

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha dalam mayoritas kepemilikannya di tangan pemerintah bertanggung jawab melakukan dalam pelayanan publik, memenuhi kesejahteraan dibidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, keamanan perekonomian dari kebebasan dalam beragam hal lainnya. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari ilmu ekonomi, sektor publik juga sebagai suatu entitas dalam aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik.

Perkembangan akuntansi sektor publik yang semakin mengalami kemajuan menimbulkan tuntutan lebih besar terkait dengan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2006). Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah bentuk laporan pertanggungjawabannya atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah telah diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Apabila laporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, nantinya berdampak pada kerugian daerah, kelemahan administrasi, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya. Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) bahwa laporan keuangan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Yuliani, Nardirsyah dan Bakar 2010)

Informasi yang bermanfaat bagi pemakai yaitu informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Maka informasi yang disajikan harus bersifat informatif dan terbuka dalam laporan keuangan. Suatu karakteristik yang dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan dan pemakai informasi. Dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), menyangkut dua pokok elemen yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya (Wahyono, 2004).

Sumber Daya Manusia yaitu faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas pendidikan akuntansi, sering mengikuti dalam pelatihan dan pendidikan atau mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan sehingga sumber daya manusia (SDM) mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Selain dalam kapasitas sumber daya manusia yang baik sistem pengendalian intern

pemerintah harus sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan keyakinan atas tercapainya organisasi melalui kegiatan efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain sumber daya manusia dan sistem pengendalian inter, pemanfaatan teknologi juga memiliki peranan penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam keterandalan dan ketepatan waktu. Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pengendalian intern menggunakan kendali komputer, selain itu Teknologi Informasi juga dapat meningkatkan akurasi dari informasi (Yosefrinaldi 2013).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Se-Sumtra Barat . menyebutkan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah maka maka semakin baik pula kualitas laporan pemerintah daerah tersebut.

Berbeda dengan penelitian yang dihasilkan Winidyanigrum (2010) memberikan temuan empiris sumber daya manusia di bagian keuangan yang ada di pemerintahan daerah Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja memiliki beberapa pegawai akuntansi, dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Perbedaan hasil penelitian keduanya inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfatan teknologi informasi. Bagi pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada publik. Kewajiban dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah. Manfaat yang disajikan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan data, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah (Ariesta, 2013).

Faktor ketiga yang mungkin mempengaruhi dari nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sisitem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksi penggelapan (*fraund*) serta melindungi sumber daya organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi terkait dengan laporan keuangan pemerintah Lumajang mendapat perhatian khusus atas prestasinya yang buruk dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti Tahun 2017 lalu. Harapannya, di Tahun 2018 mendapatkan WTP. Dilapori oleh BPK RI bahwa Kota Lumajang bahwa atas opini auditnya WDP. Kabupaten Lumajang turun kelas yang sebelumnya WTP turun ke WDP. Gagal menerima opini WTP, lantaran penyajian LKPD-nya kurang berkualitas. LKPD itu sudah diatur dengan standart akuntansi pemerintah. Kalau penyajiannya memenuhi standar, tentu mendapatkan opini tertinggi yaitu WTP. Ada 7 bab yang dikerjakan, mulai dari realisasi anggaran, sisa anggaran lebih, laporan operasional, kas, neraca, dan laporan mutasi. Hal ini menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Oleh karena itu peran sistem pengendalian merupakan hal penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran sistem pengendalian internal yaitu pemberian keyakinan atas keandalan pelaporan keuangan dengan memperoleh opini WTP dari BPK yang menjadi alat pengambilan keputusan dan melakukan pendeteksian dan penyelidikan mengenai penggelapan atau penipuan (*fraud*). Selain itu dalam pemerintah kabupaten Lumajang akan mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki untuk mendongkrak pendapatan daerah. Sebab, Lumajang memiliki tempat wisata yang indah. (www.petisi.co diakses pada hari Kamis tanggal 11 April jam 13.00 wib).

Dalam hal ini beberapa hal yang mungkin mempengaruhi masalah tersebut adalah pengendalian intern pemerintah daerah Lumajang. Kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Nilai informasi pelaporan keuangan tidak dapat terlepas dari dukungan beberapa faktor yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian inter.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menguji hubungan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul “ Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatasterdapat bahwa Kabupaten Lumajang turun kelas yang sebelumnya WTP turun ke WDP. Gagal menerima opini WTP, lantaran penyajian LKPD-nya kurang berkualitas. Maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan dengan terjadinya WDP agar menjadi WTP ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis
Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya
2. Bagi penulis
Agar mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap Pelaporan Keuangan Daerah.